

Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19

Oleh: **Ika Kurnia Indriani**

(Prodi Diploma IV Akuntansi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak)

Email: ikakurniaindriani@gmail.com

Diterima: 25 September 2022 | Revisi: 30 Desember 2022 | Diterbitkan: 31 Desember 2022

Abstrak—Penilaian kapasitas anggaran bertujuan untuk memproyeksikan kemampuan pemerintah kota di Indonesia dalam menggulangi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merupakan kejadian tidak terduga yang memiliki dampak kepada kesehatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penilaian kapasitas anggaran menggunakan tiga indikator yaitu solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan dengan teknik rasio, dan indeks dimensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 93 sample pemerintah kota. Hasil penilaian kapasitas anggaran menunjukkan bahwa pemerintah kota di Indonesia diproyeksikan memiliki ketahanan anggaran yang baik ketika dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rasio solvabilitas anggaran 3,95, kemandirian keuangan 0,52, dan solvabilitas layanan 3.968.149. Sabang, Medan, Prabumulih, Probolinggo, Surabaya, dan Magelang sebagai kota dengan indeks kapasitas anggaran tertinggi. Samarinda, Tarakan, Sibolga, Tebing Tinggi, Denpasar Bukit Tinggi, Taul, Serang, Magelang, Tegal, Medan, dan Tanjung Pinang memperoleh nilai indeks terendah. Diproyeksikan bahwa dengan kapasitas anggaran yang baik pemerintah kota di Indonesia dapat menanggulangi pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19; Solvabilitas Anggaran; Kemandirian Keuangan; Solvabilitas Layanan.

Budget Capacity Condition of Municipal Government in Indonesia Projection study to Handling COVID-19 Pandemic

Abstract—The budget capacity assessment aims to project the ability of city governments in Indonesia to overcome the COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic is an unexpected event that impacts public health and regional economic growth. The budget capacity assessment uses three indicators: budget solvency, financial independence, and service solvency with ratio techniques and index dimensions. This study used a quantitative approach with 93 city government samples. The results of the budget capacity assessment show that city governments in Indonesia are projected to have good budget resilience when dealing with the COVID-19 pandemic. The indications of budget capacity are from the budget solvency ratio of 3.95, financial independence of 0.52, and service level solvency of 3,968,149. Sabang, Medan, Prabumulih, Probolinggo, Surabaya and Magelang as cities with the highest budget capacity index. Samarinda, Tarakan, Sibolga, Tebing Tinggi, Denpasar Bukit Tinggi, Taul, Serang, Magelang, Tegal, Medan and Tanjung Pinang received the lowest index scores. It is projected that with good budget capacity, municipal governments in Indonesia will handle the Covid-19 pandemic.

Keywords: Covid-19; Budget Solvency; Financial Independence; Service-Level Solvency

PENDAHULUAN

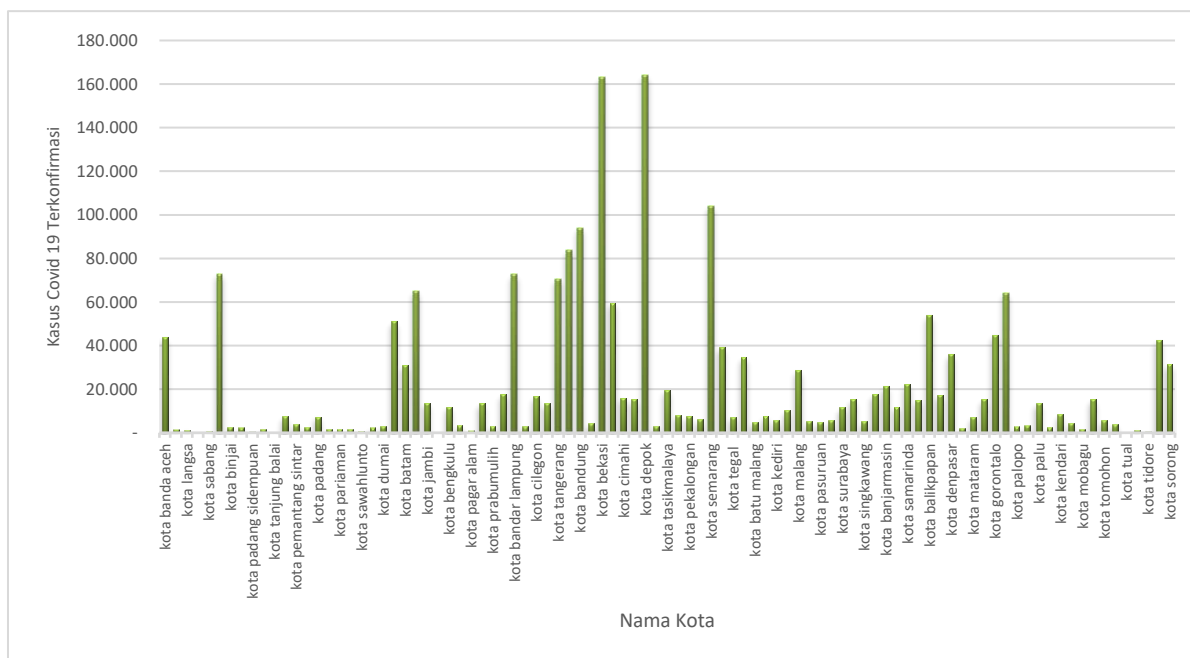
Penilaian kondisi kapasitas daerah menjadi *early warning system* bagi pemerintah daerah dari ancaman krisis keuangan (Ritonga et al., 2019). Banyak pemerintah daerah menggunakan strategi jangka pendek dalam menghadapi krisis keuangan (OECD, 2020a). Fenomena yang terjadi dimana krisis keuangan akibat pandemi COVID-19 mengancam stabilitas ekonomi nasional (Lestari & Levyda, 2022). Perubahan pola kehidupan masyarakat membawa dampak multilevel kepada seluruh sektor ekonomi. Pada akhir tahun 2020 dampak pandemi mulai dirasakan oleh sektor bisnis dimana, terjadi pemutusan tenaga kerja akibat rendahnya produksi dan menurunnya konsumsi masyarakat (Vet et al., 2021).

Pemerintah Indonesia memiliki instrumen fiskal berupa APBN dan APBD sebagai penopang ekonomi nasional. Realisasi APBN dan APBD sangat penting didalam menjaga pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi (Yamali & Putri, 2020). Stimulus fiskal yang kuat akan membantu ekonomi nasional tetap tumbuh, sehingga pengurangi dampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak buruk yang perlu diantisipasi oleh pemerintah akibat pandemi adalah menurunnya pertumbuhan ekonomi, pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan impor dan ekspor, peningkatan harga bahan pokok, dan kerugian sektor pariwisata karena menurunnya okupansi (Yamali & Putri, 2020). Pada tingkat daerah, peranan APBD menjadi krusial guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi regional. Seluruh pemerintah daerah menerapkan kebijakan darurat

dalam menghadapi pandemi COVID-19 (McDonald et al., 2020). Jumlah pemerintah kota yang ada di Indonesia mencapai 93 kota. Karakteristik pemerintah kota di Indonesia sangat beragam dengan demografi, geografis, dan tingkatan perekonomian yang berbeda-beda. Namun, dalam menghadapi pandemi COVID-19, seluruh pemerintah dituntut untuk sigap dan tanggap memberikan pelayanan kesehatan dengan kapasitas APBD yang dimiliki. Pandemi COVID-19 merepresentasikan cara pemimpin daerah dalam menanggulangi pandemi dengan cepat walaupun terjadi keterbatasan sumber daya (Sanjaya, 2020). Pendapatan pemerintah daerah akan menurun, namun diwaktu yang sama sumber anggaran sangat dibutuhkan untuk memperbaiki keadaan ekonomi (Bonaccorsi, et al., 2020).

Penyebaran kasus positif COVID-19 sangat cepat terjadi pada wilayah dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi daerah akibat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diterapkan (Khandoker & Juniper, 2022). Mobilitas masyarakat yang terbatas mengakibatkan penurunan ekonomi (Bustami, 2020). Penyebaran kasus COVID-19 sebagian besar di mulai pada wilayah perkotaan, akibat tingginya mobilitas masyarakat. Hal ini menyebabkan wilayah kota menjadi pusat penyebaran COVID-19. Jumlah penyebaran COVID-19 di wilayah kota mencapai 50% dari total kasus konfirmasi (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2022). Pada gambar 1 wilayah perkotaan dengan kasus COVID-19 tertinggi Kota Depok

(163.397 kasus) dan Bekasi (163.118 kasus) (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2022).



Gambar 1. Kasus Konfirmasi COVID-19 pada Wilayah Kota di Indonesia
Sumber: (Komite Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, 2022)

Anggaran pemerintah daerah di Indonesia masih ditopang oleh pemerintah pusat (Kurnia Indriani et al., 2022). Kondisi keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih sangat tergantung dengan dana perimbangan pemerintah pusat (Indriani et al., 2019). Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah (Indriani et al., 2019). Pandemi COVID-19 berpotensi menghadirkan krisis ekonomi yang mengancam seluruh negara di dunia (Heald & Hodges, 2020). krisis keuangan daerah disebabkan oleh depresiasi akibat penurunan pendapatan (OECD, 2020b). Pemerintah daerah menghadapi kesulitan keuangan dimana kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik meningkat, namun terjadi penurunan

pendapatan akibat krisis ekonomi (Brusca et al., 2015).

Penelitian bertujuan untuk memproyeksikan kapasitas anggaran pemerintah kota di Indonesia dalam mengantisipasi kejadian tidak terduga. Penilaian kapasitas anggaran dinilai dengan tiga indikator. Solvabilitas anggaran akan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional dengan pendapatan yang terealisasi (Ritonga, 2015). Kemandirian keuangan terkait dengan kemampuan daerah mengelola seluruh sumber pendapatan untuk meningkatkan kapasitas anggaran ditengah pandemi (Ritonga, 2015). Solvabilitas layanan akan menentukan kemampuan daerah dalam

menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat dengan sumber daya keuangan yang dimiliki (Ritonga, 2015). Kejadian tidak terduga dapat berdampak besar terhadap kapasitas APBD dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab bagaimana kondisi kapasitas anggaran pemerintah kota di Indonesia sebelum pandemi. Membentuk kondisi keuangan yang baik dapat bermanfaat untuk menghadapi kejadian tidak terduga dan memudahkan daerah dalam menghadapinya (ADB, 2021).

METODE PENELITIAN

Penilaian kapasitas anggaran pemerintah daerah menggunakan tiga tahapan. Tahapan ini terdiri dari perhitungan rasio, indeks dimensi, dan indeks indikator (Ritonga, 2015). Perhitungan rasio menggunakan tiga indikator yaitu solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan. Hasil perhitungan rasio akan di uji statistik deskriptif untuk melihat nilai minimum, maksimum, dan median. Perhitungan indeks indikator ditujukan untuk mentransformasi data rasio agar memiliki nilai 0 dan 1 (Ritonga, 2015). Perhitungan indeks dimensi bertujuan untuk memperoleh bobot masing-masing indikator sesuai dengan rata-rata geometri aritmatika, sehingga akan menghasilkan nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1 (Kurnia Indriani, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dipilih agar memberikan ruang analisis yang jauh lebih mendalam terhadap masing-masing objek penelitian. Teknik sampling dalam penelitian ini adalah

sample jenuh, dimana seluruh anggota populasi masuk dalam penilaian (Sugiyono, 2017). Sample yang digunakan adalah 93 kota di Indonesia. Laporan keuangan yang digunakan adalah realisasi anggaran. Laporan ini diperoleh dari website resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia <https://djpk.kemenkeu.go.id//portal/data/apbd>. Data penilaian kapasitas anggaran menggunakan realisasi anggaran tahun 2014 hingga 2019.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penilaian rasio kapasitas anggaran pemerintah kota di Indonesia berdasarkan hasil uji ststidtik deskriptif pada tabel 1 menunjukkan informasi sebagai berikut. Kapasitas anggaran berdasarkan indikator solvabilitas anggaran berada dalam kondisi baik. Pada tabel 1 nilai median rasio solvabilitas anggaran berada pada nilai 3,95; 1,17; 2,07; 0,63; 2,09; 1,11; dan 1,01. Rasio solvabilitas anggaran terendah yaitu 0,43, dimana pendapatan DAU menjadi penopang utama terlaksananya belanja operasional daerah. Pemerintah kota di Indonesia masih sangat bergantung dengan DAU sebagai penopang APBD. Sedangkan, rasio tertinggi berada pada nilai 19,06, perbandingan antara DAK terhadap realisasi belanja pegawai.

Rasio indikator kemandirian keuangan pemerintah kota di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan oleh tabel 1 dimana nilai median rasio kemandirian keuangan pemerintah kota di Indonesia 0,16; 0,17; 0,52; dan 0,10. Nilai ini dapat diartikan bahwa presentase kemandirian keuangan pemerintah kota di Indonesia berada pada 16,0%, 17,0%, 52,0%, dan 10,0%.

Pendapatan daerah yang langsung dibawa kendali pemerintah kota hanya sebesar 16%. Sedangkan, 52,0% pendapatan kota masih pengaruhi oleh realisasi DAU. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan pemerintah kota di Indonesia terhadap dana transfer pemerintah pusat sangat tinggi. Pemerintah kota di Indonesia masih sangat bergantung kepada pendapatan DAU sebagai penopang utama APBD.

Median rasio solvabilitas layanan pada tabel 1 menunjukan nilai 3.968.149; 840.771; 3.042.340; 4.033.331; 2.085.960; 370.761; dan 618.745. Kapasitas anggaran belanja pemerintah kota untuk menyelenggarakan pelayanan publik (per individu) sebesar Rp3.968.149. Sedangkan, kapasitas anggaran pendapatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik (per individu) sebesar Rp4.033.331. Kapasitas belanja dan pendapatan pemerintah kota di Indonesia cukup besar untuk menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat (Kurnia Indriani, 2021).

Indeks kapasitas anggaran pemerintah kota di Indonesia kurun waktu 2014-2019 berada pada kondisi baik. Pada tabel 2, 3, dan 4 menunjukkan hasil indeks dimensi kapasitas anggaran. Indeks solvabilitas anggaran memiliki rata-rata nilai 0,22. Indeks kemandirian keuangan rata-rata nilai 0,31. Sedangkan rata-rata indeks solvabilitas layanan 0,22. Hasil perhitungan rata-rata indeks dimensi memiliki nilai lebih besar dari 0. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas anggaran pemerintah kota di Indonesia dalam keadaan yang baik dan diproyeksikan mampu menaggulangi pandemi COVID-

19. Dalam mengatasi kejadian tidak terduga seperti pandemi, bencana alam, crisi ekonomi, hingga perubahan iklim membutuhkan ketahanan kapasitas anggaran yang kuat (Dzigbede & Pathak, 2020).

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kapasitas anggaran tahun 2014-2019 terdapat pemerintah kota yang memiliki nilai tertinggi dan terendah. Berikut ini adalah hasil perhitungan indeks kapasitas anggaran.

- 1) Kapasitas anggaran dengan nilai tertinggi secara nasional pada meliputi Bima, Probolinggo, Sabang, Prabumulih, dan Medan untuk solvabilitas layanan. Kemandirian keuangan terbaik Bima, Surabaya, dan Magelang. Solvabilitas layanan terbaik diperoleh Kota Sabang. Sedangkan, nilai indeks terendah meliputi Samarinda, Tarakan, Sibolga, Tebing Tinggi, dan Denpasar untuk solvabilitas anggaran. Kemandirian keuangan terendah Tanjung Pinang, Tarakan, Bukit Tinggi, Taul, dan Serang. Solvabilitas layanan indeks terendah diperoleh Magelang Tegal, Denpasar, dan Medan.
- 2) Kapasitas anggaran pada wilayah pulau Sumatera pada tabel 2 meliputi Padang Panjang, Subulussalam, Sabang, Pabumulih, dan Medan untuk solvabilitas anggaran tertinggi. Kemandirian keuangan tertinnggi dipeoleh oleh Batam, Palembang, dan Medan. Sedangkan solvabilitas layanan terbaik diperoleh oleh Kota Sabang.
- 3) Kapasitas anggaran pada wilayah Jawa pada tabel 3 meliputi Tangerang Selatan, Probolinggo,

- Magelang, Cimahi, Banjar, dan Sukabumi memiliki solvabilitas anggaran tertinggi. Kota Surabaya dan Magelang memeprolah indeks kemandirian keuangan tertinggi. Solavbilitas Layanan tertinggi dipeoleh Kota Mojokerto selama enam tahun pengamatan.
- 4) Kapasitas anggaran pemerintah kota di pulau Kalimantan pada tabel 4 dengan indeks solvabilitas anggaran tertinggi diperoleh Tarakan, Pontianak, Balikpapan, Bontang, dan Banjarmasin. Kemandirian keuangan terbaik diperoleh Pontianak, Singkawang, dan Banjarmasin. Solvabilitas layanan terbaik adalah Kota Bontang.
 - 5) Kapasitas anggaran pemerintah kota di wilayah pulau Bali dan Nusa Tenggara pada tabel 4 menunjukkan bahwa Kota Bima dan Denpasar memiliki solvabilitas anggaran dan kemandirian keuangan tertinggi. Sedangkan solvabilitas layanan terbaik diperoleh Bima dan Mataram.
 - 6) Kapasitas anggaran pemerintah kota di pulau Sulawesi pada tabel 4 menunjukkan bahwa Gorontalo, Manado, dan Makassar memperoleh indeks solvabilitas anggaran tertinggi. Kota Pare Pare, Manado, dan Makassar memperoleh indeks kemandirian keuangan tertinggi. Solvabilitas layanan terbaik diperoleh Tomohon dan Pare Pare.
 - 7) Kapasitas anggaran pemerintah kota di wilayah pulau Maluku dan Papua pada tabel 4 menunjukkan solvabilitas anggaran tertinggi diperoleh Kota Ambon, Tual, dan Jayapura.
 - 8) Kemandirian keuangan tertinggi dipeoleh oleh Tual, Ternate, dan Jayapura. Solvabilitas layanan terbaik terdapat pada Kota Ternate.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Rasio Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, dan Solvabilitas Layanan Tahun 2014-2019

Indikator	N	Mean		Median	Std. Deviation	Skewness	Std. Error of Skewness	Kurtosis	Std. Error of Kurtosis	Minimum	Maximum	
		Valid	Missing									
Kapasitas Anggaran	Rasio A	558.00	0.00	4.31	3.95	1.60	1.23	0.10	2.06	0.21	0.81	11.06
	Rasio B	558.00	0.00	1.21	1.17	0.35	8.43	0.10	100.66	0.21	0.76	6.38
	Rasio C	558.00	0.00	2.20	2.07	1.14	12.17	0.10	175.39	0.21	0.98	19.06
	Rasio D	558.00	0.00	0.65	0.63	0.19	8.78	0.10	110.62	0.21	0.43	3.53
	Rasio E	558.00	0.00	2.31	2.09	0.84	1.25	0.10	2.10	0.21	0.48	5.67
	Rasio F	558.00	0.00	1.18	1.11	0.56	11.61	0.10	163.99	0.21	0.62	9.34
	Rasio G	558.00	0.00	1.02	1.01	0.16	11.96	0.10	192.75	0.21	0.77	3.79
Kemandirian Keuangan	Rasio A	558.00	0.00	0.19	0.16	0.12	1.18	0.10	1.28	0.21	0.02	0.64
	Rasio B	558.00	0.00	0.20	0.17	0.13	2.12	0.10	9.78	0.21	0.02	1.23
	Rasio C	558.00	0.00	0.52	0.52	0.09	9.51	0.10	145.23	0.21	0.22	1.97
	Rasio D	558.00	0.00	0.10	0.10	0.06	0.53	0.10	0.47	0.21	0.00	0.40
Solvabilitas Layanan	Rasio A	558.00	0.00	4360821.74	3968149.22	2619505.93	2.37	0.10	9.38	0.21	186879.32	20241451.94
	Rasio B	558.00	0.00	1033249.34	840771.80	730601.65	2.06	0.10	6.34	0.21	69157.69	5541321.50
	Rasio C	558.00	0.00	3353463.28	3042340.09	2057709.09	2.39	0.10	9.54	0.21	153203.37	15600295.50
	Rasio D	558.00	0.00	4370208.65	4033331.32	2593032.65	2.41	0.10	9.90	0.21	448129.27	20311635.17
	Rasio E	558.00	0.00	2259132.55	2085960.61	1371178.92	2.64	0.10	12.59	0.21	239630.47	11446336.55
	Rasio F	558.00	0.00	481966.22	370761.14	482468.92	2.83	0.10	14.26	0.21	0.00	4219365.30
	Rasio G	558.00	0.00	697430.79	618745.32	369743.90	1.07	0.10	1.33	0.21	53778.81	2169485.99

Sumber: (Data Olahan, 2022)

Keterangan:

	Indeks Tertinggi
	Indeks Terendah

Tabel 2. Indeks Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota Tahun 2014-2019 Indikator Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, dan Solvabilitas Layanan-Wilayah Sumatera

No	Nama Kota	2014			2015			2016			2017			2018			2019		
		Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan
1	Banda Aceh	0.16	0.23	0.25	0.32	0.31	0.25	0.31	0.23	0.29	0.37	0.34	0.24	0.33	0.31	0.22	0.32	0.30	0.22
2	Lhokseumawe	0.14	0.23	0.20	0.21	0.30	0.21	0.24	0.19	0.22	0.29	0.33	0.20	0.11	0.25	0.18	0.10	0.25	0.18
3	Langsa	0.14	0.26	0.24	0.28	0.35	0.23	0.31	0.21	0.30	0.33	0.35	0.31	0.18	0.35	0.22	0.18	0.34	0.22
4	Subulussalam	0.13	0.24	0.36	0.40	0.34	0.50	0.47	0.18	0.57	0.36	0.30	0.52	0.11	0.25	0.34	0.11	0.25	0.34
5	Sabang	0.13	0.27	0.96	0.19	0.33	0.98	0.49	0.16	0.92	0.34	0.33	0.94	0.13	0.36	0.97	0.13	0.35	0.97
6	Medan	0.19	0.30	0.11	0.30	0.39	0.12	0.23	0.27	0.12	0.24	0.51	0.11	0.64	0.48	0.00	0.84	0.48	0.00
7	Binjai	0.16	0.18	0.15	0.22	0.21	0.14	0.23	0.19	0.17	0.29	0.38	0.14	0.09	0.30	0.17	0.09	0.29	0.17
8	Gunung Sitoli	0.13	0.21	0.21	0.29	0.34	0.23	0.25	0.19	0.27	0.17	0.24	0.25	0.10	0.23	0.24	0.10	0.23	0.24
9	Padang Siderempuan	0.20	0.23	0.16	0.24	0.23	0.16	0.20	0.18	0.19	0.28	0.45	0.20	0.18	0.27	0.17	0.17	0.26	0.17
10	Sibolga	0.13	0.25	0.37	0.25	0.38	0.41	0.11	0.18	0.44	0.25	0.39	0.38	0.08	0.29	0.40	0.10	0.29	0.38
11	Tanjung Balai	0.12	0.20	0.19	0.28	0.24	0.16	0.17	0.20	0.20	0.18	0.30	0.17	0.10	0.27	0.19	0.12	0.27	0.18
12	Tebing Tinggi	0.12	0.25	0.25	0.24	0.30	0.23	0.12	0.21	0.27	0.12	0.47	0.37	0.05	0.32	0.27	0.09	0.32	0.25
13	Pernantang Sintang	0.22	0.21	0.16	0.23	0.27	0.17	0.29	0.19	0.20	0.13	0.31	0.17	0.08	0.35	0.22	0.08	0.35	0.22
14	Bukit Tinggi	0.24	0.26	0.25	0.31	0.28	0.21	0.36	0.10	0.23	0.34	0.38	0.23	0.10	0.24	0.28	0.11	0.23	0.29
15	Padang	0.22	0.22	0.10	0.28	0.30	0.10	0.17	0.22	0.11	0.28	0.43	0.11	0.13	0.35	0.12	0.13	0.35	0.12
16	Padang Panjang	0.26	0.28	0.47	0.27	0.30	0.50	0.25	0.19	0.57	0.28	0.31	0.60	0.09	0.23	0.55	0.09	0.22	0.55
17	Pariaman	0.17	0.26	0.33	0.23	0.24	0.31	0.21	0.14	0.35	0.29	0.29	0.32	0.13	0.21	0.32	0.13	0.21	0.32
18	Puyakumbuh	0.17	0.23	0.25	0.21	0.36	0.30	0.18	0.22	0.30	0.29	0.42	0.28	0.09	0.26	0.30	0.08	0.26	0.30
19	Sawahlunto	0.18	0.26	0.47	0.29	0.28	0.49	0.28	0.18	0.53	0.32	0.33	0.49	0.22	0.22	0.44	0.21	0.21	0.44
20	Sokok	0.20	0.26	0.37	0.33	0.33	0.34	0.26	0.18	0.41	0.34	0.32	0.37	0.06	0.18	0.41	0.06	0.18	0.41
21	Dumai	0.13	0.09	0.23	0.23	0.21	0.16	0.21	0.19	0.20	0.20	0.43	0.22	0.22	0.41	0.22	0.22	0.41	0.22
22	Pekanbaru	0.14	0.18	0.12	0.16	0.20	0.11	0.28	0.24	0.10	0.28	0.48	0.10	0.23	0.36	0.10	0.13	0.36	0.11
23	Batam	0.16	0.35	0.10	0.29	0.46	0.10	0.36	0.36	0.11	0.28	0.54	0.09	0.12	0.45	0.11	0.13	0.45	0.11
24	Tanjung Pinang	0.11	0.08	0.22	0.32	0.21	0.15	0.22	0.20	0.22	0.28	0.39	0.20	0.26	0.33	0.20	0.26	0.33	0.20
25	Jambi	0.15	0.25	0.13	0.21	0.34	0.13	0.22	0.29	0.15	0.24	0.46	0.14	0.11	0.41	0.15	0.11	0.40	0.16
26	Sungai Penuh	0.16	0.19	0.37	0.22	0.20	0.35	0.20	0.15	0.42	0.25	0.28	0.36	0.11	0.20	0.40	0.11	0.19	0.40
27	Bengkulu	0.19	0.20	0.12	0.16	0.17	0.12	0.28	0.15	0.14	0.21	0.39	0.15	0.18	0.35	0.15	0.18	0.35	0.15
28	Lubuk Linggau	0.15	0.18	0.22	0.25	0.25	0.17	0.25	0.22	0.19	0.26	0.42	0.20	0.14	0.30	0.20	0.15	0.30	0.20
29	Pagar Alam	0.16	0.15	0.31	0.26	0.21	0.28	0.28	0.17	0.29	0.32	0.48	0.29	0.27	0.33	0.23	0.27	0.33	0.24
30	Palembang	0.17	0.24	0.10	0.24	0.36	0.09	0.26	0.29	0.11	0.30	0.57	0.11	0.11	0.41	0.12	0.11	0.41	0.12
31	Prabumulih	0.13	0.14	0.29	0.18	0.16	0.24	0.28	0.20	0.26	0.51	0.34	0.20	0.26	0.22	0.27	0.25	0.22	0.22
32	Pangkal Pinang	0.15	0.24	0.20	0.21	0.33	0.21	0.19	0.27	0.28	0.26	0.42	0.21	0.11	0.39	0.24	0.11	0.38	0.24
33	Bandar Lampung	0.16	0.22	0.09	0.32	0.34	0.08	0.41	0.30	0.10	0.17	0.47	0.11	0.13	0.37	0.11	0.13	0.37	0.11
34	Metro	0.17	0.24	0.28	0.24	0.31	0.29	0.19	0.25	0.35	0.28	0.52	0.35	0.09	0.33	0.33	0.09	0.33	0.33

Sumber: (Data Olahan, 2022)

Keterangan:

	Indeks Tertinggi
	Indeks Terendah

Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19.....(Ika Kurnia Indriani)



p-ISSN 2580-2690

e-ISSN 2615-3025

**Tabel 3. Lanjutan Indeks Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota Tahun 2014-2019
Indikator Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, dan
Solvabilitas Layanan-Wilayah Jawa**

No	Nama Kota	2014			2015			2016			2017			2018			2019		
		Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan
35	Cilegon	0.17	0.27	0.22	0.32	0.44	0.26	0.32	0.34	0.28	0.29	0.48	0.27	0.16	0.42	0.25	0.17	0.42	0.25
36	Serang	0.19	0.16	0.05	0.31	0.27	0.06	0.30	0.17	0.06	0.21	0.36	0.08	0.19	0.16	0.07	0.19	0.16	0.07
37	Tangerang	0.18	0.39	0.17	0.38	0.52	0.19	0.45	0.37	0.20	0.46	0.66	0.21	0.11	0.52	0.25	0.11	0.52	0.25
38	Tangerang Selatan	0.59	0.14	0.27	0.37	0.52	0.11	0.31	0.38	0.12	0.32	0.60	0.11	0.11	0.50	0.13	0.11	0.49	0.13
39	Bandung	0.21	0.30	0.28	0.26	0.41	0.30	0.46	0.33	0.32	0.35	0.56	0.31	0.17	0.50	0.33	0.17	0.49	0.33
40	Banjar	0.17	0.22	0.12	0.35	0.30	0.12	0.26	0.19	0.15	0.35	0.31	0.12	0.39	0.23	0.12	0.15	0.22	0.13
41	Bekasi	0.20	0.29	0.06	0.36	0.46	0.08	0.24	0.32	0.09	0.20	0.48	0.08	0.17	0.43	0.10	0.16	0.43	0.10
42	Bogor	0.17	0.25	0.11	0.33	0.27	0.11	0.34	0.31	0.13	0.39	0.40	0.12	0.20	0.37	0.14	0.25	0.37	0.14
43	Cimahi	0.24	0.23	0.09	0.48	0.35	0.12	0.21	0.22	0.11	0.49	0.38	0.11	0.11	0.29	0.12	0.11	0.29	0.12
44	Cirebon	0.19	0.24	0.23	0.35	0.33	0.26	0.26	0.27	0.27	0.36	0.39	0.25	0.27	0.38	0.25	0.27	0.37	0.25
45	Depok	0.18	0.28	0.04	0.40	0.51	0.05	0.25	0.30	0.06	0.30	0.58	0.05	0.13	0.43	0.07	0.14	0.43	0.07
46	Sukabumi	0.22	0.26	0.18	0.35	0.31	0.18	0.33	0.26	0.19	0.41	0.39	0.19	0.31	0.37	0.19	0.32	0.36	0.19
47	Tasikmalaya	0.21	0.20	0.11	0.33	0.25	0.10	0.20	0.19	0.12	0.27	0.32	0.12	0.15	0.28	0.13	0.15	0.28	0.13
48	Magelang	0.20	0.27	0.01	0.35	0.40	0.01	0.48	0.85	0.02	0.31	0.44	0.01	0.11	0.38	0.03	0.11	0.37	0.03
49	Pekalongan	0.17	0.27	0.15	0.33	0.35	0.14	0.26	0.24	0.16	0.29	0.40	0.15	0.18	0.34	0.15	0.18	0.34	0.15
50	Salatiga	0.22	0.29	0.23	0.36	0.44	0.22	0.23	0.23	0.29	0.26	0.48	0.27	0.10	0.32	0.27	0.10	0.32	0.28
51	Semarang	0.18	0.30	0.13	0.33	0.47	0.13	0.31	0.32	0.16	0.23	0.44	0.15	0.17	0.39	0.17	0.11	0.39	0.18
52	Surakarta	0.17	0.25	0.16	0.30	0.34	0.14	0.25	0.27	0.18	0.29	0.46	0.18	0.11	0.38	0.20	0.11	0.38	0.21
53	Tegal	0.23	0.30	0.01	0.29	0.43	0.02	0.26	0.30	0.02	0.30	0.50	0.01	0.27	0.40	0.02	0.27	0.40	0.02
54	Jogja	0.25	0.26	0.21	0.23	0.37	0.23	0.24	0.31	0.25	0.36	0.63	0.24	0.16	0.48	0.26	0.16	0.48	0.27
55	Batu Malang	0.21	0.24	0.17	0.24	0.21	0.20	0.29	0.18	0.20	0.41	0.40	0.18	0.33	0.30	0.20	0.28	0.30	0.21
56	Bitar	0.20	0.22	0.27	0.29	0.28	0.29	0.26	0.23	0.34	0.38	0.47	0.31	0.19	0.35	0.32	0.20	0.35	0.32
57	Keciri	0.29	0.25	0.21	0.39	0.36	0.21	0.13	0.18	0.26	0.26	0.39	0.23	0.28	0.30	0.22	0.28	0.29	0.22
58	Maduin	0.16	0.20	0.21	0.34	0.38	0.25	0.20	0.22	0.28	0.41	0.39	0.31	0.11	0.29	0.28	0.11	0.28	0.28
59	Malang	0.20	0.23	0.11	0.29	0.33	0.11	0.38	0.32	0.13	0.39	0.40	0.09	0.18	0.38	0.13	0.18	0.38	0.13
60	Mojokerto	0.20	0.21	0.30	0.35	0.31	0.30	0.22	0.20	0.41	0.44	0.44	0.32	0.24	0.33	0.35	0.24	0.32	0.35
61	Pasuruan	0.22	0.25	0.18	0.30	0.29	0.19	0.24	0.23	0.22	0.31	0.36	0.20	0.17	0.37	0.23	0.18	0.36	0.23
62	Probolinggo	0.28	0.23	0.19	0.51	0.43	0.17	0.27	0.21	0.21	0.22	0.39	0.22	0.18	0.31	0.21	0.18	0.30	0.21
63	Surabaya	0.20	0.41	0.16	0.38	0.66	0.19	0.31	0.46	0.19	0.35	0.70	0.20	0.14	0.60	0.22	0.15	0.60	0.22

Sumber: (Data Olahan, 2022)

Keterangan:

 Indeks Tertinggi
 Indeks Terendah

**Tabel 4. Lanjutan Indeks Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota Tahun 2014-2019
Indikator Solvabilitas Anggaran, Kemandirian Keuangan, dan Solvabilitas Layanan-
Wilayah Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua**

No	Nama Kota	2014			2015			2016			2017			2018			2019		
		Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Anggaran	Kemandirian Keuangan	Solvabilitas Layanan
64	Pontianak	0.13	0.19	0.11	0.31	0.32	0.11	0.24	0.27	0.12	0.26	0.49	0.12	0.12	0.39	0.15	0.13	0.39	0.15
65	Singakwang	0.15	0.29	0.18	0.23	0.31	0.15	0.20	0.17	0.17	0.30	0.38	0.16	0.11	0.30	0.19	0.12	0.29	0.20
66	Palangkaraya	0.15	0.20	0.17	0.27	0.29	0.17	0.21	0.13	0.20	0.24	0.36	0.19	0.15	0.21	0.19	0.15	0.20	0.19
67	Banjarmasin	0.16	0.16	0.08	0.22	0.22	0.08	0.23	0.22	0.10	0.39	0.49	0.09	0.18	0.33	0.10	0.18	0.33	0.11
68	Banjarbaru	0.14	0.27	0.20	0.22	0.30	0.25	0.23	0.25	0.26	0.28	0.43	0.22	0.12	0.38	0.24	0.13	0.38	0.25
69	Samarinda	0.10	0.10	0.19	0.27	0.19	0.18	0.29	0.21	0.14	0.20	0.41	0.14	0.12	0.30	0.17	0.14	0.30	0.17
70	Bontang	0.21	0.11	0.42	0.23	0.15	0.46	0.31	0.20	0.37	0.40	0.42	0.29	0.14	0.24	0.38	0.15	0.24	0.38
71	Balikpapan	0.16	0.22	0.25	0.29	0.17	0.23	0.32	0.23	0.18	0.39	0.45	0.15	0.14	0.33	0.21	0.15	0.33	0.21
72	Tarakan	0.28	0.11	0.26	0.13	0.08	0.12	0.31	0.15	0.17	0.22	0.31	0.13	0.09	0.29	0.17	0.09	0.29	0.17
73	Denpasar	0.25	0.31	0.12	0.45	0.50	0.13	0.38	0.36	0.14	0.45	0.61	0.13	0.25	0.48	0.14	0.24	0.48	0.14
74	Bima	0.65	0.90	0.23	0.19	0.31	0.07	0.17	0.18	0.08	0.39	0.52	0.09	0.06	0.25	0.09	0.05	0.25	0.07
75	Mataran	0.16	0.28	0.13	0.23	0.38	0.14	0.24	0.29	0.17	0.24	0.52	0.17	0.11	0.39	0.17	0.11	0.39	0.17
76	Kupang	0.23	0.29	0.11	0.27	0.32	0.11	0.17	0.24	0.14	0.21	0.40	0.13	0.09	0.36	0.15	0.09	0.36	0.15
77	Gorontalo	0.30	0.24	0.19	0.28	0.41	0.25	0.20	0.27	0.28	0.29	0.49	0.26	0.34	0.39	0.24	0.33	0.38	0.24
78	Makassar	0.18	0.25	0.10	0.26	0.38	0.12	0.31	0.33	0.14	0.36	0.53	0.13	0.12	0.44	0.14	0.12	0.44	0.14
79	Palopo	0.23	0.26	0.22	0.27	0.45	0.27	0.17	0.26	0.37	0.18	0.43	0.33	0.09	0.39	0.33	0.09	0.38	0.32
80	Pare-Pare	0.26	0.30	0.27	0.30	0.47	0.36	0.19	0.27	0.42	0.20	0.42	0.40	0.18	0.35	0.30	0.18	0.35	0.30
81	Palu	0.13	0.26	0.20	0.25	0.41	0.22	0.20	0.31	0.24	0.31	0.52	0.20	0.22	0.41	0.19	0.22	0.40	0.18
82	Bau-Bau	0.20	0.27	0.23	0.20	0.37	0.31	0.22	0.17	0.31	0.17	0.39	0.32	0.11	0.19	0.21	0.12	0.19	0.21
83	Kendari	0.11	0.26	0.19	0.19	0.35	0.19	0.17	0.26	0.25	0.20	0.42	0.18	0.08	0.38	0.21	0.09	0.37	0.21
84	Bitung	0.15	0.29	0.20	0.22	0.28	0.18	0.24	0.23	0.20	0.28	0.44	0.20	0.08	0.35	0.25	0.08	0.34	0.25
85	Mobagu	0.12	0.25	0.23	0.29	0.39	0.24	0.17	0.19	0.30	0.28	0.39	0.31	0.10	0.37	0.32	0.10	0.36	0.32
86	Manado	0.19	0.26	0.18	0.41	0.48	0.21	0.21	0.24	0.24	0.32	0.51	0.22	0.12	0.34	0.20	0.12	0.34	0.20
87	Tomohon	0.13	0.23	0.28	0.21	0.26	0.25	0.18	0.23	0.32	0.18	0.38	0.33	0.06	0.27	0.34	0.06	0.27	0.33
88	Ambon	0.22	0.23	0.08	0.23	0.30	0.09	0.18	0.20	0.10	0.29	0.37	0.08	0.16	0.29	0.10	0.15	0.29	0.10
89	Tual	0.15	0.30	0.27	0.42	0.37	0.33	0.33	0.22	0.38	0.47	0.22	0.33	0.09	0.25	0.35	0.09	0.25	0.35
90	Ternate	0.16	0.29	0.59	0.26	0.24	0.53	0.26	0.14	0.59	0.23	0.38	0.67	0.12	0.25	0.61	0.13	0.25	0.61
91	Tidore	0.14	0.25	0.34	0.28	0.23	0.32	0.25	0.15	0.36	0.39	0.33	0.32	0.13	0.28	0.39	0.13	0.28	0.39
92	Jayapura	0.19	0.24	0.21	0.31	0.29	0.21	0.27	0.20	0.24	0.37	0.29	0.19	0.19	0.30	0.22	0.19	0.30	0.22
93	Sorong	0.18	0.24	0.19	0.30	0.20	0.17	0.25	0.18	0.20	0.29	0.33	0.20	0.07	0.21	0.21	0.07	0.21	0.21

Sumber: (Data Olahan, 2022)

Keterangan:

 Indeks Tertinggi
 Indeks Terendah

Kondisi Kapasitas Anggaran Pemerintah Kota di Indonesia-Studi Proyeksi Menghadapi Pandemi COVID-19.....(Ika Kurnia Indriani)



p-ISSN 2580-2690
e-ISSN 2615-3025

Penilaian kapasitas anggaran pemerintah kota di Indonesia dengan indikator solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, dan solvabilitas layanan menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Pengelolaan keuangan daerah yang optimal akan membantu pemerintah dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi ditengah kondisi yang sulit. Pandemi COVID-19 secara langsung membawa dampak kepada bidang kesehatan. Namun yang perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah adalah dampak yang terjadi pada bidang lainnya.

Pandemi COVID-19 diproyeksikan akan menambah anggaran belanja, ditengah realisasi penerimaan pajak yang menurun (Iman & Pasaribu, 2022). Penerimaan pajak dan retribusi daerah akan berdampak kepada kapasitas fiskal pemerintah kota (Martini et al., 2022). Pengelolaan sumber daya keuangan yang lebih optimal sangat diperlukan untuk mengantisipasi kejadian tidak terduga dimasa depan (Lucianelli et al., 2017).

Pemerintah kota di Indonesia sebagian besar mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam proporsi APBD (Muhyiddin & Nugroho, 2021). Tingkat kemandirian keuangan yang masih rendah menjadi indikasi lemahnya kapasitas anggaran daerah di Indonesia. Pemulihan kapasitas anggaran dimasa pandemi tergantung kepada strategi pemerintah daerah dalam mengelola APBD. Selain itu, pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang tepat dalam memperkecil penyebaran virus COVID-19.

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan berperan pada proses penanganan COVID-19 di daerah (Basri & Gusnardi, 2021). Kapasitas anggaran yang baik akan membantu daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal. Wilayah perkotaan menjadi pusat penyebaran kasus COVID-19. Hal ini disebabkan oleh mobilitas masyarakat yang tinggi karen wilayah perkotaan menjadi pusat bisnis dan pemerintahan. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan yang optimal sangat dibutuhkan pada wilayah perkotaan. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik ini pemerintah kota membutuhkan jumlah anggaran yang cukup besar, sehingga kualitas layanan dapat optimal (Ariany & Putera, 2013)

Hal yang perlu diantisipasi pemerintah kota setelah terjadinya pandemi adalah pelaksanaan perbaikan ekonomi. Krisis ekonomi pasca pandemi perlu dihadapi dengan kekuatan kapasitas fiskal yang lebih tinggi. Pemulihan ekonomi dimasa depan sangat terkait dengan strategi antisipatif pemerintah daerah atas kapasitas anggaran yang dimiliki (Ahrens & Ferry, 2020). Pandemi COVID-19 terjadi begitu cepat dan berdampak luas kepada seluruh sektor ekonomi (Nasution et al., 2020). APBD sebagai instrumen fiskal menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah (Fajria et al., 2021). Kapasitas anggaran pemerintah daerah menjadi parameter penting dalam menghadapi kejadian tidak terduga (Ritonga et al., 2019).

Semakin baik kapasitas anggaran maka akan memudahkan pemerintah daerah dalam menanggulangi sebuah kejadian tidak terduga. Diproyeksikan pemerintah kota dengan indeks kapasitas anggaran daerah tertinggi, akan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah dimasa pandemi COVID-19. Sedangkan pemerintah kota dengan indeks kapasitas anggaran terendah perlu melakukan optimalisasi pengelolaan APBD. Salah satu strategi yang dapat digunakan yaitu realokasi dan *refocusing* anggaran (Temenggung et al., 2020). Tujuan strategi ini adalah mempertahankan kapasitas anggaran daerah ditengah kondisi pandemi COVID-19.

KESIMPULAN

Hasil penilaian kondisi kapasitas anggaran dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemerintah kota di Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 akan berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh indikator solvabilitas anggaran yang memiliki tingkat kemampuan pemerintah kota dalam memenuhi belanja daerah dengan APBD diproyeksikan akan berjalan dengan baik. Kemandirian keuangan daerah relatif rendah akibat proporsi pendapatan transfer pemerintah pusat yang tinggi. Pemerintah kota dapat melakukan optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kemandirian keuangan dimasa depan. Pemerintah kota di Indonesia memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan baik. Hal ini ditopang oleh kapasitas pendapatan dan

belanja daerah yang besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk.

Kondisi kapasitas anggaran pemerintah kota di Indonesia dalam keadaan yang baik sebelum pandemi terjadi. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kemampuan daerah dalam menanggulangi penyebaran kasus COVID-19 dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah kota dengan indeks kapasitas anggaran tertinggi akan mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi ditengah kondisi pandemi. Sedangkan, pemerintah kota dengan kapasitas anggaran yang rendah perlu melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran, agar mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahrens, T., & Ferry, L. (2020). Financial resilience of English local government in the aftermath of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 813–823.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0098>
- Ariany, R., & Putera, R. E. (2013). Analisis Kinerja Organisasi Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Publik di Kota Pariaman. *MIMBAR, Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 29(1), 33.
<https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i1.364>
- Basri, Y. M., & Gusnardi, G. (2021). Pengelolaan Keuangan Pemerintah di Masa Pandemi COVID-19 (Kasus Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 33–48.
<https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9803>

- Brusca, I., Rossi, F. M., & Aversano, N. (2015). Drivers for the financial condition of local government: A comparative study between Italy and Spain. *Lex Localis*, 13(2), 161–184.
[https://doi.org/10.4335/13.2.161-184\(2015\)](https://doi.org/10.4335/13.2.161-184(2015))
- Bustami, A. W. (2020). Pengaruh Covid-19 Terhadap Perekonomian Masyarakat. *Al-Dzahab*, 1(1), 31–38.
- Dzigbede, K. D., & Pathak, R. (2020). COVID-19 economic shocks and fiscal policy options for Ghana. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 903–917.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0127>
- Fajria, Z., Wahono, B., & Farida, E. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19. *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 1–20.
- Heald, D., & Hodges, R. (2020). The accounting, budgeting and fiscal impact of COVID-19 on the United Kingdom. *Journal of Public Budgeting, Accounting and Financial Management*, 32(5), 785–795.
<https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0121>
- Iman, Q., & Pasaribu, E. (2022). Entrepreneurial Development in the Indonesian Economy. *Journal of Resilient Economies (ISSN: 2653-1917)*, 2(1).
<https://doi.org/10.25120/jre.2.1.2022.3911>
- Indriani, I. K., Lestari, M. P., & Triani, M. (2019). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten di Kalimantan. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 159–173.
<http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/7675/2970>
- Khandoker, T., & Juniper, J. (2022). Macroeconomic Impacts of Declining Wage Share in National Income. *Journal of Resilient Economies (ISSN: 2653-1917)*, 2(1).
<https://doi.org/10.25120/jre.2.1.2022.3922>
- Kurnia Indriani, I. (2021). Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Kota Di Indonesia (Proyeksi Dalam Menghadapi COVID-19). *ISAS*, 9(1), 371–389.
- Kurnia Indriani, I., Widodo, A., Ananta Wikrama Tungga Dewi, V., Akuntansi, J., Negeri Pontianak, P., Jenderal Ahmad Yani, J., & Laut, B. (2022). Penilaian Ketangguhan Kapasitas Anggaran Daerah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Published by Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung*, 8(2), 170–187.
<https://financial.ac.id/index.php/financial>
- Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. (2022). *Data Sebaran*. Jakarta: Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Retrieved April 10, 2021, from <https://covid19.go.id/>
- Lestari, R., & Levyda, L. (2022). *Strategi Krisis dan Manajemen Krisis Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Dengan Pendekatan 4Cs (Causes , Consequences , Caution , Coping)*. 5(1), 48–58.
- Lucianelli, G., Citro, F., Santis, S., Tranfaglia, A. E., & Mazzillo, A. (2017). How to Improve the Financial Conditions of Local Governments in a Period of Crisis:

- An Explanatory Case Study. *International Journal of Business and Management*, 13(1). <https://doi.org/10.5539/ijbm.v13n1.p53>
- Martini, R., Lorensa, L., & Amri, D. (2022). Pajak Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, dan Belanja Modal: Bukti Empiris Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 271–278. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20247>
- McDonald, B. D., Goodman, C. B., & Hatch, M. E. (2020). Tensions in State–Local Intergovernmental Response to Emergencies: The Case of COVID-19. *State and Local Government Review*, 52(3), 186–194. <https://doi.org/10.1177/0160323X20979826>
- Muhyiddin, M., & Nugroho, H. (2021). A Year of Covid-19: A Long Road to Recovery and Acceleration of Indonesia’s Development. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.181>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- OECD. (2020a). *Initial Budget and Public Management Responses to the Coronavirus(COVID-19) Pandemic in OECD Countries*. April, 1–206.
- OECD. (2020b). The impact of the COVID-19 crisis on regional and local governments: Main findings from the joint CoR-OECD survey. *OECD Regional Development Papers*, 5.
- Ritonga, I. T. (2015). Developing a Measure of Local Government’s Financial Condition. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142–164. <https://doi.org/10.22146/jieb.6206>
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. (2019). Factors Affecting Financial Condition of Local Government in Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 1–25. <https://doi.org/10.18196/jai.2002114>
- Sanjaya, N. (2020). Regional Budgeting Policy In The Covid-19 Pandemic Era (Case Study at the Regional Government of Banten Province). *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2), 273–290.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D). In *Metodologi Penelitian*. In *Metodologi Penelitian*.
- Temenggung, Y. A., Moenek, R., Suwanda, D., & Mulyadi, M. (2020). The Fiscal Capacity of the New Autonomous Region (DOB) in Increasing Economic Growth and Eradication of the Poor. *Jurnal Bina Praja*, 12(1), 75–87. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.75-87>
- Vet, J. M. D. E., Nigohosyan, D., Ferrer, J. N., Gross, A., Kuehl, S., & Flickenschild, M. (2021). Impacts of the COVID-19 pandemic on EU industries. *Publication for the Committee on Industry, Research and Energy, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, European Parliament*, March, 1–83.

https://cdn.g4media.ro/wp-content/uploads/2021/03/IPOL_STU2021662903_EN.pdf

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>

